

**MENUJU “KEBANGSAAN”
Pendekatan Teori Konflik: Sejarah Perkembangan Intelektual Di Indonesia**

**Oleh:
AGUS BUDIMAN¹**

ABSTRAK

Teori Konflik pada dasarnya berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat berbagai kritik. Teori konflik ini sebenarnya berasal dari berbagai sumber seperti teori Marxian (konflik kelas sosial) dan pemikiran konflik sosial dari Simmel. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural fungsionalnya. Teori ini lebih merupakan sejenis fungsionalisme struktural yang angkuh ketimbang teori yang benar-benar berpandangan kritis terhadap masyarakatnya. Para ahli teori konflik ini berorientasi ke dalam studi struktur dan institusi sosial. Sedikit sekali pemikiran teori ini yang berlawanan secara langsung dengan pendirian fungsionalis. Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf. Teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Menurut Dahrendorf sendiri, dan teoritis konflik lainnya, setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Teoritis fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Artikel ilmiah ini mencoba menerapkan salah satu teori konflik yang dikemukakan oleh Dahendrof pada permasalahan awal gejolak politik yang terjadi di Hindia Belanda. Gejolak politik tersebut adalah upaya untuk melakukan sebuah perubahan yang dilakukan oleh para intelektual awal di Indonesia kepada pemerintahan kolonial di Hindia Belanda dengan menggunakan beberapa media, salah satunya adalah surat kabar.

Kata Kunci: *Kebangsaan, sejarah intelektual dan teori konflik*

ABSTRACT

Conflict theory basically developed as a reaction to the theory of structural functionalism and as a result of various criticisms. This conflict theory is actually derived from a variety of sources such as the Marxian theory (social class conflict) and social conflict thinking of Simmel. The fundamental problem in conflict theory is a theory that never managed to separate itself from its functional structural roots. This theory is a kind of structural functionalism arrogant rather than theory really holds critical to its citizens. Experts conflict theory is oriented to the study of social structures and institutions. Few thought that the opposite of this theory directly to the establishment of functionalist. This scientific article using the approach of conflict theory advanced by Dahrendorf. Conflict theory and functional theory to be aligned. According to the functionalist, society is static or communities are in a state of change in a balanced manner. According to Dahrendorf himself, and other conflict theorists, any community at any time subject to the process of change. Functionalist theorists emphasize the social order, while the conflict theorists see the disputes and conflicts in the social system. This scientific article tries to apply one of the theories put forward by Dahendrof conflict at the beginning of the problems of the political turmoil in the Indies. The political turmoil is an attempt to make a change made by the early intellectuals in Indonesia to the Dutch East Indies colonial administration in using multiple media, one of which is a newspaper.

Keywords: *Nationality, intellectual history and theory of conflict*

PENDAHULUAN

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologinya harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Dalam memandang persoalan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita takkan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Konflik dapat membentuk konsensus dan integrasi. Contohnya adalah perlawanan intelektual Pribumi di Hindia Belanda yang ingin melakukan perubahan dan melawan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Inti gagasan dari teori konflik Dahendrof adalah didalam posisi masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahendrof membagi otoritas didalam posisi dengan dua kelas sosial. Pertama kelas yang mempunyai subjek kekuasaan yang tinggi (*superordinat*), dan kelas yang menjadi objek dari kekuasaan subjek yang tinggi (*subordinat*). Dahendrof tak hanya tertarik kepada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukan”. Menurut Dahendrof, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Masyarakat yang selalu mempunyai kelompok konflik dengan otoritasnya, atau kelompok semu yang ada membuat satu penafsiran dalam studi kasus yang akan dijelaskan oleh penulis sebagai rencana awal bahan penulisan tesis tentang perebutan ruang publik di Hindia Belanda, dengan konteks perlawanan intelektual pribumi melalui surat kabar dalam periode pergerakan nasional. Teoriti fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teoritis konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari

pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teoritis konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologinya harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita takkan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Konflik dapat membentuk konsensus dan integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dan Jepang yang berkembang sesudah Perang Dunia II, atau contoh yang lebih spesifik adalah Politik Etis yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda kepada Rakyat Pribumi di Hindia Belanda yang dimana pada awalnya seluruh sumber daya yang berada di tanah Nusantara ini di eksploitasi habis-habisan oleh Belanda. Pada dasarnya ada hubungan timbal balik antara konsensus dengan konflik, Dahrendorf tidak terlalu optimis dalam pengembangan teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua proses itu. Dia menyatakan: “Mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat barat. Untuk menghindarkan diri dari teori tunggal itu. Dahrendorf membangun teori konflik masyarakat. Dahendrof memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahendrof tak hanya tertarik kepada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukan”. Menurut Dahendrof, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Dahendrof ditentang para

peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Misalnya, ia dikritik oleh orang yang memusatkan perhatian pada ciri-ciri psikologi individu yang menempati posisi itu. Tetapi menurut Dahrendrof, orang yang melakukan pendekatan demikian bukanlah sosiolog. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendrof. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka menduduki posisi otoritas diharapkan bisa mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang-orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orang nya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum; mereka yang tunduk pada kontrol, ditentukan di dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang.

Menurut Dahrendrof, otoritas tidak konstan karena ia terletak dalam posisi, bukan di dalam diri orangnya. Karena itu seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan yang lain. Begitu pula seseorang yang berada didalam posisi subordinat dalam kelompok lain. Ini berasal dari argumen Dahrendrof yang menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut *asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif*. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki posisi otoritas. Karena masyarakat sendiri terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi subordinat di unit lain. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi; oleh karena itu terbagi menjadi dua, dan hanya ada dua kelompok konflik yang dapat terbentuk di dalam setiap asosiasi. Kelompok yang memegang posisi otoritas dan kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu “yang arah dan substansinya saling bertentangan”. Di sini kita berhadapan dengan konsep kunci lain dalam teori konflik Dahrendrof yaitu, “kepentingan”. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama. Dahrendrof tetap menyatakan bahwa kepentingan itu, yang sepertinya tampak sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya adalah fenomena yang berskala luas: Didalam setiap asosiasi, orang yang berada pada posisi dominan

berupaya mempertahankan *status quo*, sedangkan orang yang berada di posisi subordinat berupaya mengadakan perubahan (hal ini terlihat nanti pada contoh kasus perlawanan intelektual pribumi melawan dominasi kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda). Konflik kepentingan di dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Ini berarti legitimasi otoritas selalu terancam. Konflik kepentingan ini tak selalu mesti didasari oleh pihak subordinat atau pihak superordinat dalam melakukan aksi. Kepentingan superordinat (pemerintahan Kolonial Hindia Belanda) dan subordinat (Intelektual Pribumi) adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang diletakan dalam posisi. Setiap individu tak selalu perlu menginternalisasikan harapan itu atau tak perlu menyadarinyadalam rangka bertindak sesuai dengan harapan itu. Bila setiap individu menempati posisi tertentu, maka mereka akan berperilaku menurut cara yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian yang digunakan pada penelitian jurnal ilmiah ini adalah metode sejarah (*historis*). Metode historis adalah suatu upaya untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta, lalu menyusun kesimpulan mengenai peristiwa pada masa lalu. Tujuannya adalah untuk membuat rekontruksi masa lalu secara sistematis dan objektif (Garraghan, 1957: 34). Tahapan penelitian dalam metode historis terbagi menjadi empat tahapan. Tahap pertama adalah heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Heuristik merupakan tahapan awal yang dilakukan setelah menentukan topik atau permasalahan penelitian. Heuristik sendiri adalah proses menemukan dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang terkait dengan pokok permasalahan. Tahap pencarian sumber dilakukan terhadap sumber tertulis, sumber benda dan lisan. Sumber tertulis berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, buku dan lain-lain. Pencarian sumber primer yang sezaman berbentuk sumber resmi tercetak, surat kabar dan buku dilakukan di beberapa perpustakaan, antara lain: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) di Jl. Salemba Raya No. 28A, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA) di Jl. Soekarno Hatta No.

629, Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan (FKIP) Universitas Galuh dan Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah di FKIP Universitas Galuh Ciamis. Di Jakarta, PNRI penelusuran sumber tertulis dikhususkan kepada pencarian sumber sezaman, seperti surat kabar. Surat-surat kabar yang terbit sezaman tersimpan tertata, beberapa yang ditemukan dan sesuai dengan pembahasan ini adalah surat kabar *Matahari* yang terbit di Bandung pada tahun 1923. Surat kabar *Kaoem Kita*, dan surat kabar *Soerapati* yang terbit di Bandung dan di Sukabumi pada tahun 1923. Di perpustakaan BAPUSIPDA, FKIP Universitas Galuh dan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Galuh Ciamis dikhususkan kepada pencarian sumber sekunder (buku-buku) pendukung penelitian sumber sejarah perkembangan intelektual di Indonesia.

Tahap selanjutnya adalah tahapan mengkritik sumber. Kritik sumber dalam metode historis terbagi menjadi dua. Diantaranya adalah kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menentukan otentisitas sumber dengan cara memberikan penilaian terhadap kondisi fisik sumber tersebut, seperti jenis kertas yang digunakan, tinta, tulisan, huruf, *watermark*, stempel dan sebagainya. Kritik intern dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi fisik sumber tersebut. Terlebih sumber-sumber sezaman yang terlihat dari surat-surat kabar yang terbit pada tahun 1920 sampai 1927. Selain itu, akan dilakukan pula proses membandingkan data yang sudah ada di dalam sumber tersebut dengan data yang ada di dalam sumber tersebut dengan sumber lainnya.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian yang logis. Pada tataran operasionalnya interpretasi dilakukan secara analitis yakni mengurai fakta dan dilakukan secara sintesis yaitu menghimpun fakta. Pemahaman secara verbal tidak memadai untuk menginterpretasikan informasi yang terkandung di dalam sumber sejarah. Fakta yang diperoleh diinterpretasikan baik secara verbal, teknis, logis, faktual dan psikologis. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam.

Tahapan terakhir dalam penulisan sejarah menggunakan metode *historis*, Historiografi. Historiografi adalah tahapan penulisan sejarah. Fakta yang telah diinterpretasikan kemudian dituliskan dalam penulisan yang sistematis dan kronologis. Historiografi yang akan dihasilkan

dibagi menjadi beberapa pembahasan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan metode sejarah, penulis mendapat panduan bagaimana teknis penelitian jurnal ilmiah ini dapat dikerjakan secara efektif dan akurat. Efektif dalam pengertian tahapan demi tahapan dikerjakan dengan terperinci. Akurat dalam pengertian hanya sumber yang telah menjadi fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan penulisan jurnal ilmiah ini. Selain itu, unsur diakronis yang menunjukkan sejarah, sebagai ilmu tentang berfikir dalam waktu sangat diperhatikan.

Pada penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan teori dan konsep pendekatan ruang publik untuk membangun sebuah narasi sejarah dalam eksplanasi. Penulis menggunakan konsep-konsep teori posmarxisme yang dicetuskan oleh Jurgen Habermas dalam menganalisis permasalahan sosial diruang publik. Ruang publik pada dasarnya diartikan menjadi ruang atau tempat berkerumunnya manusia untuk melakukan semua komunikasi yang terjadi. Ruang publik secara umum diartikan sebagai tempat yang menjadi pusat dari proses interaksi manusia, maka sejatinya konsep ruang publik bisa terdapat di mana saja (termasuk didalam media surat kabar). Salah satu tokoh yang memperhatikan perkembangan ruang publik ialah Jurgen Habermas. Habermas membagi konsep ruang publik menjadi tiga jenis. Hal ini dijelaskan sebagaimana berikut:

“Ruang Publik yang memiliki makna beragam seperti ‘(sang) publik’, ‘ruang publik’, atau ‘publisitas’ mengacu kedalam pengertian ruang publik. Dibedakan menjadi tiga jenis:

1. Ruang Publik Politik; artinya ‘ruang publik politis’ (atau kadang-kadang diterjemahkan dalam frase lebih panjang menjadi ‘ruang publik di wilayah politik/politis’).
2. Ruang Publik Literatur; diartikan sebagai ‘ruang publik sastra/literer’ (atau ‘ruang publik di dunia sastra/tulis-menulis), dan
3. Ruang Publik Representasi; artinya “ruang publik representasi/perwakilan” ruang publik yang pertunjukan kekuatan spiritual inheren atau kehormatan di depan khalayak yang menonton (Habermas, 2010:xi).

Ruang publik mempunyai definisi yang luas. Perkembangan mengenai ruang publik yang bergeser kearah ruang publik politik menurut pemikiran Habermas ini menjadi awal dari gerakan perlawanan masyarakat dalam diskursus teori kritis. Teori kritis yang

dikembangkan oleh para pemikir atau filsuf yang menolak gagasan awal Marx. Menurut Bernstein dan Kellner teori kritis adalah produk sekelompok pemikir *marxisme* baru, berasal dari Jerman yang tidak puas dengan keadaan teori Marxian (Goodman, 2007: 176). Teori kritis sebagian besar terdiri dari kritik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual. Habermas dan teori ruang publiknya adalah salah satu pemikir dari *mazhab frankfurt*². Kelas intelektual baru di Hindia Belanda lahir ketika era pergerakan nasional, dan akhirnya kelas intelektual baru di Hindia Belanda pada tahun 1920-an bisa dikatakan menjadi subjek perubahan kelas sosial. Karena kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, tertulis dalam sejarah Indonesia ketika pada masa pergerakan nasional hanya berada di lingkungan terpelajar. Pergeseran arti dari perkembangan ruang publik yang dikemukakan oleh Habermas ini menjadi dasar pemikiran sejarah perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan pemerintahan daerah bahkan perebutan pengaruh diinternal organisasi pergerakan di Hindia Belanda dengan menggunakan media beberapa surat kabar yang berada di Jawa Barat dan di Hindia Belanda pada kurun waktu tahun 1920-an. Meskipun Habermas sendiri terlahir setelah tahun 1924, konsep perebutan ruang publik yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun-tahun 1920 sampai 1926 sangat relevan untuk mendasari gerakan perlawanan intelektual penduduk pribumi di Hindia Belanda. Mau intelektual yang berideologi komunis, sosialis atau nasionalis. Kekuatan besar secara politik yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1920, masih menjadi cengkraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Perebutan ruang publik yang dilandasi oleh pemikiran Habermas ini menjadi ruang perebutan tempat kaum terpelajar penduduk pribumi. Kalangan terpelajar pribumi dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif di dalam media surat kabar masuk ke dalam ruang publik politik. Ruang publik menjadi tempat masyarakat dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif (Hardiman, 2009: 133). Jadi, perlawanan yang dilakukan oleh surat kabar

Soerapati dalam kurun waktu 1923-1925 ini adalah perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan pemerintah lokal dengan gaya baru, perlawanan yang tidak menggunakan senjata melainkan dengan menggunakan intelektual dan jurnalistik sebagai pendekatan untuk penelitian sejarah perekonomian Indonesia pada masa kolonial.

PEMBAHASAN

Kelompok Konflik dan Perubahan

Dahrendrof membedakan tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok semu (*quasi group*), atau “sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama”. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kedua, yakni kelompok kepentingan. Kedua kelompok ini dilukiskan oleh Dahrendrof seperti berikut:

“Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari *kelompok kepentingan* yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan, atau program dan anggota perorangan (Dahrendrof, 1959:180).

Dari berbagai jenis kelompok kepentingan itulah muncul *kelompok konflik* atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Menurut Dahrendrof, konsep kepentingan tersembunyi, kepentingan nyata, kelompok semu, kelompok kepentingan, dan kelompok-kelompok konflik adalah konsep dasar untuk menerangkan konflik sosial. Di bawah kondisi yang *ideal* tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendrof menyebut kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi (Goodman, 2004:157). Aspek terkahir dari teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dengan perubahan, dalam hal ini Dahrendrof mengakui

² *Mazhab Frankfurt* ialah sebuah nama yang diberikan kepada kelompok filsuf yang memiliki afiliasi dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt

Jerman. *Mazhab Frankfurt* adalah sebuah nama organisasi yang berkaitan dengan teori kritis (Goodman, 2008: 176).

pentingnya pemikiran Lewis Coser, yang memusatkan perhatian kepada fungsi konflik dalam mempertahankan *status quo*. Tetapi, Dahrendrof menanggapi fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial; konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya Dahrendrof menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Apa pun ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan *status quo*.

Kelompok kepentingan disini salah satunya adalah intelektual Indonesia yang berada di Belanda. Mereka membentuk sebuah wadah organisasi yang bernama *Perhimpunan Indonesia*³. Perkumpulan para pelajar (intelektual) Indonesia di Belanda didirikan pada awal abad ke-20. Salah satu yang ikut tergabung kedalam organisasi PI ini adalah Abdul Rivai yang mendirikan surat kabar *Bintang Timur*. Surat kabar yang terbit pada tanggal 26 September 1927 membahas tentang PI. Menjelaskan bahwa orang Indonesia yang tinggal di Netherland berhak (*rechten*) seperti orang Belanda, namun tidak begitu di Indonesia. Indonesia diperintah menurut pelajaran *Koloniale politiek*. Prof. Dr. Moresco, mengajarkan dulu kepada muridnya di Bestuur Academie, bahwa *Koloniale politiek* itu "*rassen politiek*" (Rivai, 2000: 28). Politik mengenai perbedaan suku bangsa dan ras itu tidak ada di Netherland. Menurut Rivai orang Indonesia yang tinggal di Negeri Belanda itu sama haknya dengan orang Belanda. hak mengenai persamaan dalam bidang politik dan ekonomi di Belanda dengan orang Indonesia tertulis di dalam *grondwet* (Undang-Undang). Pribumi atau orang-orang Indonesia yang di negrinya tidak mempunyai hak tersebut, di Belanda untuk bertukar pikiran kepada sesama intelektual Indonesia demi membela bangsanya di Indonesia. Lahirnya generasi intelektual pribumi baru membuat satu dasawarsa penting untuk menuju kemerdekaan oleh intelektual modern pada abad ke-20. Dalam tulisannya Abdul Rivai membedakan karakteristik bangsawan yang berada di Hindia Belanda. "Bangsawan Pikiran dan Bangsawan Oesoel", bangsawan pikiran, yang belakangan

menjadi slogan di antara generasi yang lebih muda dalam gerakan modernisasi dan kemajuan di Hindia Belanda. Abdul Rivai menulis:

Adam, (2003: 175) menyatakan bahwa "*bila kita bandingkan bangsa Hindia dengan "bangsa koelit poetih", maka pelbagai djoea perbedaan, jang akan didapati...sama besarnja dengan kelainan boemi dan langit...apakah sebab perbedaan ini?...di tanah Europa adalah doea djinis Bangsawan:*

1. *Bangsawan Oesoel, dan*
2. *Bangsawan Pikiran."*

Bangsawan Usul menurut Abdul Rivai adalah Bangsawan yang memang ada secara genetik, keturunan dan karenanya Bangsawan ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena ia menjadi bangsawan karena takdir. Namun apabila berbicara satu lagi Bangsawan menurut Abdul Rivai yaitu Bangsawan Pikiran setiap orang berhak memilikinya. Jalan menuju Bangsawan Pikiran ini menurut Abdul Rivai adalah belajar, dan mempelajari. Pembagian karakteristik intelektual oleh Abdul Rivai ini menempatkan bahwa kaum terpelajar Indonesia yang diwakili oleh Bangsawan pikiran ini berada di dalam posisi yang sangat penting untuk memimpin bangsanya menuju kemajuan. Maka dari itu Perhimpunan Indonesia yang berasal dari para intelektual pribumi Bangsawan Pikiran ialah perhimpunan pelajar Indonesia yang rajin belajar dan pada beberapa paruh waktu diistirahatnya suka mempelajari *Koloniale politiek*, bukan pelajar yang suka bermimpi, main gamelan dimana-mana, menari disana dan disini, bukan pelajar yang suka pesta-pesta. PI ini *Academie der Koloniale Politiek*⁴ Hasil pembelajaran dari *Academie* para anggota PI yaitu dicetaknya media surat kabar yang diberi nama *Indonesia Merdeka* (Rivai, 2000:76). Hal ini sangat tidak disukai oleh Belanda. Orang-orang kulit putih merasa bahwa bangsa Indonesia belum siap dan belum matang untuk memahami politik. Apalagi politik sebagai alat perjuangan Indonesia. Belanda pada dasarnya masih mempunyai kepentingan besar kepada Hindia Belanda maka dari itu selalu ada upaya hasutan dan mencela setiap gerakan politik yang dilakukan oleh PI di Belanda. diantaranya adalah PI dianggap Komunis dan dituduh selalu mendapatkan uang dari Komunis Bolsevik di

³ Selanjutnya di singkat PI.

⁴ Akademi Politik Kolonial.

Rusia oleh L.C Westenenk sebagai Raadsman⁵. Abdul Rivai menjelaskan didalam surat kabar Bintang Timur 3 Oktober 1927 mengenai PI.

Menurut Rivai, (2000: 78) “Supaya dapat diketahui betul, apa artinya *Academie der Koloniale Poilitiek* itu, baiklah saya akan ceritakan ilmu apa yang dipelajari oleh Perhimpunan Indonesia. Yaitu:

1. *Volkenkunde*⁶ bangsa Belanda di Nederland.
2. *Volkenkunde* bangsa Belanda di Indonesia.
3. *Statistiek Indonesia*.
4. *Economie anak negri di Indonesia*.
5. *Vergelijkende studie van Staatsrecht*⁷ dan *staatsrecht Indonesia*.
6. *Gesschiedenis Koloniale politiek*⁸, mulai dari tempo *Oost Indische Compagnie*.
7. *Volksbewegingen diatas dunia*.
8. *Politiek economie dari koloniale politiek Treub lebih-lebih pula politiek ekonomi yang dijalankan oleh Mr. Fock*.
9. *Politiek humanitair dari Koloniale politiek, yaitu bagaimana tukang kebun menyiksa dan menganiaya kuli, bagaimana surat kabar meludahi dan memaki orang Indonesia, bagaimana bestuur menjalankan pekerjaannya, dll*.
10. *Politiek non cooperatie dari koloniale politiek*.

Perhimpunan Indonesia, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Rivai diatas, memberikan sebuah penjelasan bahwa PI itu bukanlah suatu lembaga atau suatu organisasi yang berhaluan atau berideologi Komunis. Hal ini menjadi satu perhatian khusus, bahwa sebenarnya Perhimpunan Indonesia itu bukan Perhimpunan Komunis. Perhimpunan Indonesia adalah Perhimpunan para intelektual Indonesia yang berfikir modern dan menjalankan ilmu sesuai dengan faedahnya, melawan segala bentuk keserakahan pemerintahan kolonial. Bertujuan untuk memerdekakan bangsanya dan membawa Indonesia dan rakyatnya menjadi satu bangsa yang besar dan bisa bersaing dan bergaul dengan orang-orang Eropa dalam ilmu pengetahuan.

Pendekatan Teori Konflik: Gejolak Politik Pada Era Kolonial

Beranjak dari teori konflik yang dijelaskan sebelumnya. Bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai kelompok konflik dengan otoritasnya, atau kelompok semu yang ada membuat satu penafsiran dalam studi kasus yang akan dijelaskan oleh penulis sebagai rencana awal bahan penulisan tesis tentang perebutan ruang publik di Hindia Belanda, dengan konteks perlawanan intelektual pribumi melalui surat kabar dalam periode pergerakan nasional. Pergerakan nasional diawali pada tahun 1901 tepatnya pada tanggal 17 September, ketika Ratu Wilhemina yang menjadi penguasa Kerajaan Belanda. Ratu Wilhemina membuat satu kebijakan mengenai utang budi Kerajaan Belanda kepada pribumi di Hindia Belanda. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Pada awalnya politik etis yang membicarakan ruang untuk irigasi, emigrasi, dan pendidikan, hanya terasa dan terlihat dalam ruang pendidikan saja. Ketika banyak dibangun sekolah-sekolah oleh pemerintah Hindia Belanda dan banyak anak-anak priyayi bersekolah dan mendapatkan pengajaran Eropa, lambat laun hal ini membuat satu kesadaran Nasional, yaitu kebangkitan kesadaran ke-Indonesiaan. Kesadaran ke-Indonesiaan yang sangat menarik untuk dituliskan adalah perkembangan surat kabar atau pers yang berisi perlawanan terhadap hegemoni otoritas pemerintahan Hindia Belanda oleh intelektual Pribumi.

Pada awalnya pers merupakan produk sampingan usaha orang Eropa di bidang budaya dan ekonomi yang bermula pada masa awal VOC abad ke-17. Kemudian pers mencoba menunjukkan bahwa perkembangannya didorong oleh motif-motif ekonomi, sosio-kultural, dan *misionaris (penyabaran agama Kristen yang dilakukan oleh Pers Tjahaja Siang di Minahasa)*. Ben Anderson percaya bahwa rasa

⁵ Penasehat.

⁶ Etnologi atau Antropologi.

⁷ Hukum Tata Negara.

⁸ Sejarah Politik Kolonial.

nasionalisme dalam masyarakat di Hindia Belanda diperluas dengan adanya surat kabar yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Sejak akhir abad ke-19 memang banyak sekali pers tumbuh, bermunculan, sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk protes, bahkan sebagai bentuk pembelaan kaum pribumi terhadap kekuasaan otoritas pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung kepada kekuasaan Belanda totok (Orang Eropa).

Tahun-tahun pada abad ke-20 menjadi saksi kelahiran kesadaran baru di kalangan bangsa Indonesia, juga tuntutan akan penyebaran pendidikan model Barat karena politik etis dibidang pendidikan. Kesadaran ini, terutama di kalangan priyayi dapat terekspresikan dalam berbagai opini dan curahan fikirannya di berbagai surat kabar dan berkala yang berkembang pada tahun-tahun peralihan abad ke-19 ke abad 20. Arus utama yang diangkat oleh para intelektual ini pada periode tersebut adalah pendidikan dan perlunya bangsa Indonesia mengejar kemajuan. Dengan demikian terjadilah konflik antara penguasa Hindia Belanda dan Intelektual Pribumi di wilayah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sejatinya bangsa yang memiliki hasrat untuk merubah dan mengingkan kemajuan harus dihadapkan pada satu otoritas penuh kekuasaan kolonial. Menurut Dahrendrof satu otoritas penuh yang menjadi superordinat akan selalu mempertahankan *status quo*, dan yang berada di wilayah subordinat akan selalu berjuang untuk melakukan suatu perubahan. Otoritas superordinat dalam studi kasus diatas adalah pemerintahan Belanda, dan subordinatnya adalah pribumi. Perjuangan untuk melakukan suatu perubahan di era Pergerakan Nasional ini telah dimulai ketika para pribumi-pribumi asli dari Nusantara ini disekolahkan di pendidikan Belanda sampai ke daratan Eropa. Salah satu yang menjadi *pioneer* dalam perjuangan pribumi untuk mengajak semua rakyat pribuminya berpendidikan dan mengetahui ilmu pengetahuan Eropa adalah Abdul Rivai.

Di Indonesia sendiri yang menjadi salah satu *pioneer* yang kritis terhadap pemerintahan kolonial adalah R.M. Tirto Adhi Soerjo. Tirto adalah seorang intelektual Indonesia yang membuat surat kabar *Medan Prijaji*. *Medan Prijaji* merupakan surat kabar yang menggunakan bahasa melayu, surat kabar sebelumnya di Hindia Belanda ini banyak sekali yang menggunakan bahasa Belanda. Surat kabar *Medan Prijaji* berada di kota Bandung, tepatnya

di Jl. Naripan. *Medan Prijaji* adalah surat kabar berbahasa melayu yang terbit di Bandung pada Januari 1907 hingga Januari 1912 (http://id.wikipedia.org/wiki/Medan_Prijaji).

Medan Prijaji dianggap penerus dari surat kabar *Bintang Hindia* yang mempunyai rasa nasionalisme rakyat pribumi yang tinggi. *Medan Prijaji* dibentuk oleh seorang siswa keluaran STOVIA bernama Rd. Mas. Tirto Adhi Soerjo. Tirto mengelola dan editor dari surat kabar *Medan Prijaji* ini. Menurut Tirto, walau bermodal awal 3.500 gulden, penerbitan *Medan Prijaji* menghabiskan biaya 7.500 gulden, yang tertutupi oleh perolehan sekitar seribu pelanggan, yang separuhnya priyayi (Adam, 2003: 188).

Gambar: Surat Kabar *Medan Prijaji*



Menurut Toer, (2003:69) sebagai pemimpin dari redaksi *Medan Prijaji*, Tirto Adhi Soerjo ini sangat berani untuk melawan ketidakadilan yang berada di Pulau Jawa. Tirto menulis sejumlah artikel dengan sangat tajam, membongkar korupsi oleh para pejabat pemerintah mau itu pejabat pemerintah kolonial atau pejabat rendah yang dipimpin oleh rakyat Hindia Belanda sendiri. Maka dari itu *Medan Prijaji* menjadi corong bagi kaum terpelajar pribumi dan forum bagi pembaca pribumi sendiri untuk saling mengekspresikan pandangan mereka secara hukum dan politik dengan mendiskusikan berbagai isu menyangkut kesejahteraan ekonomi rakyat pribumi, terutama soal pendidikan bagi kaum pribumi. Selain melancarkan kritik terhadap pemerintahan Hindia Belanda, Tirto pun kerap kali menyerang priyayi-priyayi korup dan pejabat pemerintahan yang menyelewengkan jabatannya guna mengeksploitasi orang-orang kecil. Mengapa Tirto begitu dingin ketika ia menuliskan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya, di

Hindia Belanda, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan kepada rakyat pribumi? Pramoedya menuliskan bahwa ketika Tirto kembali dari Maluku Tirto akan menerbitkan sebuah surat kabar yang dapat:

1. Memberikan informasi,
2. Menjadi penyuluh keadilan
3. Memberikan bantuan hukum,
4. Tempat orang tersia-sia mengadukan halnya,
5. Mencari pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan,
6. Menggerakkan bangsanya untuk berorganisasi atau mengorganisasikan diri,
7. Membangunkan dan memajukan bangsanya, dan
8. Memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan.

Atas dasar ini *Medan Prijaji* diterbitkan, atas dasar keberpihakan Tirto menulis semua apa yang salah di Hindia Belanda ini. Maka dengan ini Tirto dan *Medan Prijaji* kerap sekali mendapatkan tekanan dan masalah yang serius. Sampai Tirto mendapatkan hukuman pembuangan ke Teluk Betung. Alasan dari dibuangnya Tirto Adhi Soerjo dibuang ke Teluk Betung adalah permasalahan dengan A. Simon sebagaimana dituliskan di surat kabar *Medan Prijaji* edisi ke-20 tanggal 30 Juni 1908.

Tirto menuduh A. Simon, aspiran kontrolir di Purworejo melakukan korupsi dan menyebutnya “snotaap” (anak ingusan). Tirto dituntut oleh Simon dengan tuduhan pencemaran nama baik, dan dihadapkan ke pengadilan. Dalam pembelaannya, Tirto memang mengaku menulis artikel dan mengkritik sang aspiran kontrolir dan Mas Tjokrosanto, wedana Cangkreng Purworejo. Ia melakukannya karena marah melihat kedua orang ini menyalahgunakan kekuasaan dan bersekongkol mengeksploitasi, dan sama sekali tidak bermaksud merusak atau mencemooh pribadi keduanya. Tirto akhirnya diputuskan bersalah dan dihukum di telukbetung Keresidenan Lampung (Adam, 2003: 193-194).

Pada dasarnya pers yang merupakan corong untuk berbicara mengenai hak asasi manusia dalam konteks perlawanan terhadap pemerintahan kolonial selalu terjerumus

kedalam berbagai anakronisme. Perumusan hak asasi manusia pada awalnya tidak berbicara melalui surat kabar, tapi melalui perjanjian dan konvensi internasional untuk menuju satu perdamaian dunia. Bagaimana hak asasi manusia di dalam perjuangan oleh surat kabar? Hal ini tentunya menjadi pertanyaan ketika orang-orang yang mempunyai simpati atau orang-orang yang ikut merasakan persoalan dari pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. seperti contoh kritik yang dilakukan oleh W.R Baron van Hoevell mengenai kejamnya kebijakan tanam paksa dan melalui surat kabar *Rijdschift van Nederlandsche Indie*, kebijakan tanam paksa alangkah baiknya diberhentikan. Kebebasan setiap individu untuk mengungkapkan pikiran dalam surat kabar dan majalah, dan kebebasan untuk mencetak dan menerbitkan berkala-berkala tersebut. Itulah yang dinamakan hak asasi kebebasan pers. Namun, kebebasan pers secara penuh di masa apapun dan dalam tata kemasyarakatan manapun hanya melupakan ilusi (Matters, 2003: 4). Persoalan Tirto dengan A. Simon tidak bisa kita lihat dari perspektif kebebasan pers dalam hal pencemaran nama baik. Sejatinya Tirto menulis untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda yang sewenang-wenang. Pramoedya menuliskan pula persoalan Tirto Adhi Soerjo dengan A. Simon:

Seorang pejabat Eropa, atau lebih tepatnya Indo-Eropa, yang kurang tinggi kedudukannya, aspiran kontrolir Purworejo A. Simon. A. Simon telah bersekongkol dengan wedana dalam mengangkat seorang lurah untuk Desa Bapangan, padahal jago yang mendapatkan suara terbanyak ditangkap dan dikenakan hukuman. Terbakar oleh amarah melihat penyalahgunaan wewenang ia namai pejabat tersebut “snotaap” (monyet penetek atau ingusan). Dalam pembongkaran ini ia didukung oleh warga Desa Bapangan (Toer, 2003: 73).

Medan prijaji akhirnya sangat menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan pemerintahan kolonial. Sehingga akhir dari surat kabar *Medan Prijaji* ini dikarenakan biaya produksi yang tidak bisa diperoleh lagi. Lama-kelamaan *Medan Prijaji* menjadi surat kabar yang sepi akan iklan dan pembeli. Kemunduran *Medan Prijaji* diawali oleh publikasi-publikasi

yang tidak menguntungkan bagi pengelola. Iklan dari perusahaan-perusahaan besar membatalkan memasang iklannya di *Medan Prijaji*. Para peminjam modal pun menjadi enggan memberikan kredit. Hal ini sama persis ketika Perhimpunan Indonesia yang dianggap Komunis Bolshevik oleh penasehat di Belanda. Intelektual pribumi yang mulai berkembang dan berfikir maju dihalang-halangi oleh Kolonial Belanda, rakyat Hindia Belanda selalu diberikan pendidikan yang amat rendah, sehingga sulit untuk mengejar keterbatasan orang-orang Eropa yang sudah mengetahui persoalan politik yang ada di dunia internasional. Karena intelektual Indonesia yang terdiri dari Bangsawan Pikiran ini selalu belajar dan mempelajari, segala hal yang menjadi faktor dalam perkembangan intelektual di Indonesia dikaji dan dipelajari. Pers disini pun menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjuangan membentuk satu bangsa yang sama. Pengaruh pembentukan partai yang sosialis dan antirevolusioner yang dimulai sejak tahun 1880, membuat kelompok baru dalam warga negara, dan mulai mengambil bagian dalam polemik dan konflik yang terbuka (Matters, 2003:7).

Puncak Konflik: Intelektual Pribumi dan Pemerintah Hindia Belanda

Perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia pada akhirnya menemukan titik puncak. Untuk mempertahankan *status quo* pemerintahan Hindia Belanda atas perlawanan yang dilakukan oleh beberapa surat kabar, dan organisasi politik mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perihal menanggapi setiap persoalan dan gejolak politik yang terjadi di setiap wilayah Hindia Belanda melalui aksi-aksi propaganda di surat kabar dan aksi langsung protes kepada pemerintahan Hindia Belanda membuat satu kebijakan yang sangat menentukan nasib dari perjuangan intelektual pribumi di Indonesia. Pengawasan secara ketat kepada organisasi yang mendapat simpati besar dari rakyat seperti organisasi SI dan ISDV membuat pemerintah kolonial memberikan pengawasan sangat ketat bagi gerak-gerik dan setiap perjalanan organisasi tersebut. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda untuk pengawasan terhadap kaum pergerakan adalah dibentuknya satu lembaga Dinas Khusus di dalam struktur organisasi polisi Hindia Belanda. Dinas Khusus itu disebut *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID).

PID dibentuk pada tahun 1916, ketika pergerakan untuk perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Awal abad ke-20 ini merupakan masa yang sangat penting dalam upaya pembentukan *nasion*. PID dibentuk ketika Gubernur Jendral Hindia Belanda dipimpin oleh van Limburg Strium. Gubernur Jendral ini yang sebelumnya memutuskan hukuman pembuangan kepada Sneevliet akibat upaya penghasutan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan di Indonesia ini mendesak dan segera mendirikan PID. Dinas Intelejen Politik ini bertugas mengumpulkan segala informasi mengenai kondisi pergerakan Nasional di Hindia Belanda yang nantinya akan menjadi dasar pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengambil tindakan terhadap kaum Pergerakan yang melanggar UU. PID tersebar diseluruh kota besar Hindia Belanda. Kantor PID terdapat di beberapa kota yaitu: Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya, agen dan mata-matanya tersebar di setiap wilayah, tersebar di setiap lapisan masyarakat Hindia Belanda. PID dipimpin oleh W. Muurling, seorang mantan kapten staf umum KNIL (*Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger*), PID ditempatkan dibawah Jaksa Agung (*Procureur-Generaal*) dalam Mahkamah Agung (*Hooggerichtshof*) dalam kerjasama erat dengan Gubernur Jendral dan bergerak di luar jalur hirarki pemerintahan daerah yang ada. PID membuat laporan berkala (bulanan dan tiga bulanan) yang ditujukan kepada Gubernur Jendral maupun pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda, laporan-laporan tersebut sangat dipercayai oleh pejabat BB (*Binnenlands Bestuur*) di daerah-daerah maupun oleh penentu kebijaksanaan di Den Haag dan Batavia (Akbar, 2013:5).

Organisasi pergerakan yang dimotori oleh intelektual Indonesia tidak pernah luput dari pengawasan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. PID yang didirikan oleh Gubernur Jendral van Limburg Strium membuat pengawasan khusus kepada organisasi kaum pergerakan seperti ISDV dan SI yang termasuk kedalam organisasi gerakan radikal. Agitasi bahkan hasutan ideologi yang dibawa oleh ISDV ini membuat arah perjuangan intelektual pribumi tidak hanya anti kolonial secara "politik rasial" dalam bidang hukum, akan tetapi perjuangan ke arah anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme. Hal ini diperlihatkan ketika persidangan Sneevliet yang merupakan orang kulit putih dapat dijauhi hukuman pengasingan ke luar wilayah Hindia Belanda. meskipun pada awalnya Sneevliet

dibebaskan dari semua tuduhan. Pengawasan terhadap organisasi pergerakan Nasional pun ada ketika Gubernur Jendral Idenburg. PID pada masa Idenburg memang belum dibentuk, akan tetapi pengawasan terhadap organisasi SI oleh Idenburg sangat ketat. Pengawasan ini dilakukan oleh Idenburg kepada SI agar SI tidak berkembang menjadi organisasi yang mengarah ke gerakan yang subversif. SI, ISDV, organisasi-organisasi serikat buruh, dan organisasi berhaluan perubahan lainnya akhirnya dikenai larangan untuk mengadakan rapat umum. Tanpa seizin penguasa setempat perkumpulan organisasi disetiap kota di Hindia Belanda dilarang. Pemerintah kolonial menggunakan Dinas Intelejen Politik untuk mengawasi seluruh kegiatan organisasi politik tersebut. Apabila kegiatan rapat-rapat umum dilaksanakan oleh para *lid* organisasi dengan sembunyi-sembunyi dan diketahui oleh pemerintahan kolonial, maka Dinas Intelejen Politik ini membubarkan secara paksa semua bentuk pertemuan tersebut. Rapat-rapat yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan harus mendapat izin dari pemerintah kolonial, akan tetapi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh organisasi pergerakan yang telah mendapat izin dari pemerintah kolonial pun, tidak serta merta mendapatkan kebebasan dalam melaksanakan rapat tersebut. Dinas Intelejen Khusus tersebut juga mengawasi secara ketat dalam melaksanakan rapat-rapat tersebut. Selama jalannya rapat agen Intelejen tersebut duduk dibarisan terdepan dan di barisan akhir untuk mengawasi jalannya rapat. Hal ini diperparah dengan diberikannya hak ketika para agen tersebut berwenang untuk mengingatkan pembicara atau mememrintahkan tersebut untuk turun dari podium jika pembicaraannya sudah kearah agitasi dan ajakan untuk melakukan pemberontakan. Para tokoh dan pemimpin SI dan ISDV selalu mendapat pengawasan langsung dari Dinas Intelejen Politik ini. Hal ini sangat disukai oleh para tokoh pergerakan dan setiap *lid* organisasi pergerakan. PID akhirnya dibubarkan pada tahun 1919 karena pemerintahan sudah menganggap keadaan di Hindia Belanda ini aman dalam hal keadaan politik. Akan tetapi dibubarkan PID membuat organisasi pergerakan nasional semakin banyak dan radikal dan pengawasan untuk para tokoh pergerakan nasional. Pemerintahan Hindia Belanda akhirnya membentuk *Algemeene Recherche Dienst* (ARD), sebagai lanjutan dari tugas dan fungsi PID didalam sistem

pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. ARD ini sangat ditakuti oleh kaum pergerakan karena tugas dan fungsi dari ARD ini lebih dari PID. ARD selalu mengawasi gerak-gerik tokoh organisasi pergerakan kemana pun.

Perubahan politik pada abad ke-20 ini mencapai puncak. Pers yang menjadi titik sentral dalam upaya menyuarakan setiap ajakan dari organisasi radikal untuk perubahan di Hindia Belanda, membuat suatu titik balik kebijakan pemerintah terhadap pers. Sejak tahun 1913 penulisan tentang pers didalam surat kabar sedikit berubah. Karena ungkapan-ungkapan seperti “tulisan-tulisan yang berisi hasutan”, “pengawasan atas pers”, serta tindakan untuk mengekang pers sering terdengar. Situasi di Hindia Belanda pada dekade 1910 sampai 1930-an berubah ke arah yang tidak diinginkan. Perkembangan kearah radikal dalam organisasi politik dan surat kabar di Hindia Belanda ini membuat gusar pemerintahan Hindia Belanda.

Gubernur Jendral pada saat itu segera mengambil tindakan agar dapat lebih cepat dalam menangani para penulis atau wartawan yang berusaha menyebarkan kebencian di media surat kabar. Gubernur Jendral Hindia Belanda memperketat hukuman pidana. Gubernur Jendral Hindia Belanda Idenburg seperti contoh yang menjatuhkan hukuman pengangsingan kepada Douwes Dekker dengan penerapan kebijakan *exorbitante rechten*. Idenburg mengambil pasal 124a dan 135a dari *Indian Penal Code* sebagai contoh, dalam pasal-pasal itu dapat dihukum mereka yang dalam percakapan, tulisan, lewat tanda-tanda atau sikap lahiriah membangkitkan atau mencoba membangkitkan kebencian, penghinaan, atau rasa permusuhan terhadap pemerintahan, atau antar kelompok warga negara. Menghasut, menimbulkan keributan dan rapat-rapat politik dapat ditindak (Matters, 2003:129). Dengan diadakannya pasal-pasal tentang penyebaran kebencian terhadap pemerintahan kolonial, berharap dapat secara efektif mengekang pemberitaan di surat-surat kabar dan di rapat-rapat. Matters kembali menjelaskan bahwa kebijakan mengenai larangan penyebaran kebencian:

Perbedaan dalam ukuran hukuman antara berbagai kelompok penduduk adalah akibat digunakannya dua kitab undang-undang hukum pidana: satu untuk orang Eropa (dari tahun 1867) dan satu lagi untuk orang non-Eropa (dari tahun 1873). Tahun 1918

perbedaan ini nantinya dihapus dengan penyatuan hukuman pidana. Setelah penggabungan KUHP pada tahun 1918, maka “pasal-pasal tentang penyebaran kebencian” menjadi pasal 154 s/d 157 KUHP. Penyebaran kebencian terhadap pemerintahan mulai tahun itu dihukum dengan denda maksimum 300 gulden atau dengan hukuman penjara maksimum tujuh tahun untuk semua golongan penduduk (Matters, 2003:131).

Hukuman penyebaran kebencian dan penghinaan diantara penduduk di Hindia Belanda pada saat itu menjadi sama (antara orang Eropa dan non-Eropa). Seluruh penduduk di Hindia Belanda jika ada yang melakukan pelanggaran pasal penyebaran kebencian dan penghinaan kepada pemerintahan kolonial dapat dikenai hukuman enam bulan sampai lima tahun penjara. Keadaan dengan makin banyaknya organisasi-organisasi radikal yang berhaluan perubahan dan selalu melakukan perlawanan di media surat kabar dan aksi-aksi secara sosial membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda menambah masa hukuman penjara. Penyebaran kebencian dan terhadap pemerintah kolonial ini mendapat hukuman lima sampai sepuluh tahun di lembaga permasayarakatan. Meski terlihat ideal dalam kebijakan pemerintahan Hindia Belanda mengenai upaya penyebaran dan kebencian terhadap pemerintahan kolonial oleh organisasi radikal atau surat kabar di Hindia Belanda pada praktek penerapan hukum pidana ternyata subjektif. Pers Indonesia, ambtenar dan kaum sosial demokrat yang berjiwa etis tak lama kemudian merumuskan keluhan-keluhan menengai penerapan tindakan yuridis dan tidak samanya perlakuan terhadap wartawan Eropa dan Indonesia. Dari berbagai penjurur dimintakan perhatian para pejabat puncak gubernemen terhadap masalah ini, tokoh etis yang sebagai pejabat sementara sensus penduduk bekerja pada BB (Pemerintahan Dalam Negeri) menganggap pers Eropalah, jadi bukan pers Indonesia, sebagai biang keladi penyebar kebencian dan dendam (Matters, 2003:136-137).

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Ahmat. 2003. *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaa*,

1855-1913. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Akbar, Allan. 2013. *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelejen Politik Hindia Belanda 1916-1934*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Dahrendrof, Ralf. (1958). *Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis*. American Journal 64: 115-127.

Goodman, Douglas J. dan George Ritzer. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Matters, Mirjam. 2003. *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial antara Kebebasan dan Pembrangusan, 1906-1942*. Jakarta: Hata Mitra, Pustaka Utan Kayu, KITLV.

McVey, Ruth. T. 2009. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi.

Rivai, Abdul. 2000. *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Toer, Pramoedya Ananta. 2003. *Sang Pemula*. Jakarta: Lentera Dipantara.

Wikipedia. (2008). Medan Prijaji [online]. Tersedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Medan-Prijaji> (diakses 20 April 2014).